



**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM
INDONESIA PINTAR (PIP) DI DINAS PENDIDIKAN KOTA
PALEMBANG
(STUDI KASUS PASAL 3)**

NAMA : GUSTIANA
NIM : 19.11.202
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACT

GUSTIANA, 19.11.202 thesis title "Implementation of Minister of Education and Culture Regulation Number 10 of 2020 Concerning the Smart Indonesia Program (PIP) at the Palembang City Education Office." (Case Study Article 3) majoring in Public Administration at the Satya Negara College of State Administration (STIA) Palembang, Main Supervisor (1) Mrs. Rahmawati.SH.,M.Sc. Assistant (II) Mr. Holidan.S.Sos.,M.SI

The background of this research is based on the results of temporary observations in the implementation of the Smart Indonesia Program, problems were found in the policy implementation process. In the City of Palembang it is known that the implementation of the Smart Indonesia Program has not been running effectively and efficiently, and there is a lack of transparency in the provision of the Smart Indonesia Program (PIP), and the implementation cannot be accounted for or is not accountable, the appropriateness cannot be described or implemented in a realistic and proven manner. and the benefits are also not implemented or the activities are not in line with national priorities.

The research objective was to find out and analyze the Implementation of the Minister of Education and Culture Regulation Number 10 of 2020 concerning the Smart Indonesia Program (PIP) at the Palembang City Education Office. The method used in this study is a qualitative method, Data Management Techniques (Observation Techniques, Interview Techniques, Documentation , Literature Study) Data Analysis Techniques (Data Reduction, Data Presentation, Drawing Conclusions)

The conclusion of this research is that the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 10 of 2020 concerning the Smart Indonesia Program (PIP) at the Palembang City Education Office has been going well. This can be seen from the indicators that the author put forward, only for effective and efficient indicators the problem is that the distribution takes a long time because it has to go through the process of checking data and files and validating IWA data in the Dapodik Application so that it becomes ineffective and efficient.

Keywords: Implementation, Smart Indonesia Program (PIP)



A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang fundamental didalam kehidupan manusia sebagai bentuk keharusan yang didapatkan bagi manusia. Pendidikan merupakan aspek penting bagi sebuah negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu pendidikan perlu diselenggarakan secara sistematis untuk mengubah pengetahuan nilai-nilai sosial, pembentukan karakter, keterampilan, dan kreativitas. Di Indonesia sendiri pendidikan diatur pada pasal 28 C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan jika setiap orang berhak mengembangkan diri dengan memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan minat bakat masing-masing. Namun di Indonesia pendidikan masih dalam kategori rendah jika di bandingkan dengan negara lain seperti data yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terdapat 157.000 siswa Sekolah Dasar dan Menengah yang putus sekolah pada tahun ajaran 2019/2020. Pendidikan mampu berperan strategis dalam mencetak atau membentuk generasi yang berkualitas sekaligus kunci keberhasilan daerah dari aspek pembangunannya sehingga menjadi tantangan pemerintah negara Indonesia dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, karena bisa menjadi modal negara dalam meningkatkan proporsi penduduk untuk menyelesaikan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan tanggungjawab negara atas meningkatkan kualitas pendidikan yang tertera pada alenia 4 Undang-Undang Dasar 1945 jika mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tugas pemerintah. Maka dari itu, pemerintah mempunyai kewenangan untuk dapat memberikan jaminan pendidikan kepada masyarakat agar siswa putus sekolah dapat diatasi. Sedangkan pemerintah provinsi hanya

mengelola pendidikan tinggi dan menengah. Perubahan kekuasaan tersebut berdampak pada beragamnya interpretasi dan kebijakan pemerintah daerah dalam hal sistem pendataan, struktur organisasi, dan sarana prasarana pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar bertujuan untuk meningkatkan akses bagi anak berusia 6 tahun samapi dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah agar mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi. Jika siswa yang sudah putus sekolah maka bias mendapatkan layanan pendidikan lagi baik disekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus/pelatihan, atau satuan pendidikan nonformal. Menurut mendefinisikan kebijakan sebagai tindakan yang mengarahkan individu, kelompok, atau pemerintah untuk menetapkan tujuan dan hambatan dalam lingkungan tertentu sambil mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan. Dari beberapa sudut pandang tentang kebijakan, dapat ditarik satu kesamaan, yaitu kebijakan harus dikaitkan dengan rencana aksi yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Jika evaluasi kebijakan adalah proses mengukur keberhasilan implementasi kebijakan dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan tujuan atau indikator kebijakan. Evaluasi kebijakan melibatkan seluruh proses kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, terutama evaluasi pelaksanaan kebijakan publik. Evaluasi kebijakan diperlukan untuk memahami apa yang akan terjadi setelah kebijakan diimplementasikan atau direalisasikan, sehingga dapat mengevaluasi apakah kebijakan tersebut berhasil direalisasikan atau perlu perbaikan. Maka dari adanya Program Indonesia Pintar ini masih perlu dievaluasi dalam menangani masalah anak putus sekolah. Kartu Indonesia Pintar merupakan bagian dari kebijakan dari



Presiden Ir. Joko Widodo. Kartu ini diresmikan bersamaan dengan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera pada 3 November 2014. PIP menysasar 24 juta siswa kurang mampu yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima Bantuan Siswa Miskin. Pada tahap pertama, PIP akan diterapkan di 18 kabupaten/kota dengan sasaran 152.434 siswa di jenjang SD, SMP, SMA/SMK. Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, PIP direncanakan menysasar 20,3 juta siswa kurang mampu. Pada kenyataannya penerima program

Program Indonesia Pintar untuk kalangan siswa-siswi yang bersekolah tidak tepat sasaran. Didalam proses pengambilan keputusan siapa yang berhak atas PIP belum jelas aturannya khususnya di SMA Negeri 1 Kotagajah. Proses pengambilan keputusan masih menggunakan input data yang dilakukan oleh operator sekolah melalui aplikasi DAPODIK, sehingga pengambilan keputusan penerima PIP banyak yang tidak tepat sasaran.

Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP) pada Dinas Pendidikan Kota Palembang.” (Studi Kasus Pasal 3

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam pembahasan Peneliti ini yaitu Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP) pada Dinas Pendidikan Kota Palembang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP) pada Dinas Pendidikan Kota Palembang.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti

Sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi sarjana sosialpada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Satya Negara Palembang.

2. Dinas Pendidikan Kota Palembang

Sebagai masukan yang mungkin dapat dipergunakan dalam pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan program Indonesia Pintar (PIP)

3. STIA Satya Negara

Sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian dengan permasalahan yangsama

2. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Implementasi

Pengertian Implementasi Menurut Horn (Tahir, 2014:55), “Implementasi sebagai tindakantindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”. Menurut Majone dan Wildavsky dalam Nurdin dan Usman (2002:30), “implementasi adalah sebagai evaluasi dan sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengertian kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik



- a. Pengertian Kebijakan Publik Kebijakan publik merupakan salah satu program yang menyertakan sarana dan prasarana dibuat oleh suatu organisasi atau institusi publik yang membutuhkan penerapan dan tujuan ke khalayak ramai dengan mempertimbangkan berbagai hal yang menghambat dan mendukungnya.
- b. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan.

2.3 Model-Model Implementasi

a. Model Implementasi Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn (dalam Winarno 2012:155) ada 6 (enam) variabel, yang mempengaruhi kinerja kebijakan yaitu :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.
2. Sumberdaya Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia
3. Karakteristik Agen Pelaksana Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksananya
4. Sikap/Kecenderungan (Disposition) para pelaksana. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang

mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

5. Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

b. Model Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

Model mereka ini sering disebut oleh para ahli "the down approach". Menurut Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2012:167), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna (perfect implementation) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
2. Tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari pada hubungan kausalitas yang handal.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungannya.
5. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
6. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
7. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
8. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
9. Pihak-pihak yang memiliki wewenang/kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

C. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, di mana terdapat



banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu Pihak yang memiliki Wewenang Waktu dan Sumberdaya yang tersedia 17 ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Berdasarkan model implementasi menurut George C. Edward III, maka faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu :

- a. Komunikasi
- b. Sumber Daya (Resources)
- c. Disposisi (Disposition)
- d. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

2.4 Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) diselenggarakan berdasarkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Indonesia Sehat untuk 22 Membangun Keluarga Produktif. Pada tanggal 21 Februari 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Nadiem Anwar Makarim menetapkan Peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP). Permendikbud ini muncul karena adanya Inpres sesuai dengan program yang harus dijalankan. Berdasarkan isi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar Pasal 1 dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Indonesia Pintar (PIP) yang selanjutnya disingkat Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.

2. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut Program Indonesia Pintar (PIP) Dikdasmen adalah Program Indonesia Pintar (PIP) yang diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah. Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan 2
3. bantuan berupa uang tunai yang diberikan langsung kepada siswa. Mereka yang menerima adalah siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Dengan bantuan ini peserta didik mendapatkan kesempatan belajar dan membiayai kebutuhan pendidikan. Program Indonesia Pintar (PIP) adalah kartu yang diberikan kepada Peserta Didik pada satuan pendidikan formal atau nonformal sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). Sistem Informasi Program Indonesia Pintar (PIP) atau yang biasa disebut Sipintar adalah sistem informasi yang menyimpan, mengelola, dan menyampaikan data dan informasi terkait Program Indonesia Pintar.

2.4 Tujuan Program Indonesia Pintar (PIP)

Berdasarkan isi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) Pasal 2, Program Indonesia Pintar (PIP) bertujuan untuk membantu biaya personal pendidikan peserta didik dalam rangka: Bagi Pendidikan Dasar dan Menengah

- a. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21



(dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun

- b. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.
- c. Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah dan satuan pendidikan nonformal

2.3.2 Tujuan Penggunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP)

1. Membeli buku dan alat tulis
2. Membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, atau sejenisnya)
3. Membiayai transportasi Peserta Didik ke sekolah
4. Ang saku Peserta Didik
5. Biaya kursus/les tambahan bagi Peserta Didik pendidikan nonformal
6. Biaya praktik tambahan dan biaya magang/penempatan kerja

C. PROSEDUR PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2018:8) Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang dikumpulkan dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:2) Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk

memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal ini, terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu metode ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Menurut pendapat tersebut dapat diketahui bahwa metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif ialah metode untuk membahas tentang fenomena fenomena atau kondisi yang ada. Menurut Strauss dan Corbin dalam V. Wiratna Sujarweni (2014:6) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur prosedur statistik atau dari kuantifikasi (pengukuran) lainnya. Peneliti memilih jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif agar lebih mudah memahami dan mendeskripsikan Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan

Definisi Konsep Konsep merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak atau suatu objek. Seperti yang diungkapkan Nasution (2018:161), bahwa “bila seseorang dapat menghadapi benda atau peristiwa sebagai suatu kelompok, golongan, kelas atau kategori, maka ia telah belajar konsep.” Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah: 1. Implementasi adalah implementasi sebagai rangkuman dari berbagai aktivitas yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai tujuan strategis. 2. Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis dalam mengolah dan mencari sumber-sumber yang erat hubungan dengan permasalahannya yang dibahas dalam melakukan penelitian. Adapun



teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Observasi Observasi adalah melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti secara langsung yang ada hubungan dengan penulisan skripsi.
2. Wawancara Wawancara adalah tanya jawab yang berhubungan dengan pihak yang dianggap berhubungan dengan data atau informasi yang diperlukan
3. Studi Pustaka Teknik kepustakaan yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu dengan membaca dari berbagai sumber buku-buku, literatur, tulisan ilmiah dan media yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini yang telah didapat, dikumpulkan dan diberikan klasifikasi.
4. Dokumentasi Dipergunakan untuk memperoleh data tertulis dari sumber resmi. Dikemukakan Yin (2008: 104), berkaitan dengan kesimpulan pertemuan, laporan peristiwa tertulis, laporan penelitian, proposal untuk proyek, laporan kemajuan, kliping, dan artikel di media masa.

3.6 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 35 analisa deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2009:335), Teknik analisa deskriptif kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Langkah-langkah analisa data yaitu sebagai berikut.

- a. Reduksi data Reduksi data pada proses pengumpulan data melalui interview, observasi dan

dokumentasi. Data yang didapat dari hasil penelitian kemudian direkam dalam bentuk catatan, selanjutnya melakukan penyeleksian masing-masing data yang relevan dengan focus penelitian.

- b. Penyajian data Setiap data yang diperoleh, disajikan dalam bentuk daftar kategori. Kemudian melakukan penafsiran sehingga dapat menyelesaikan atau menjawab yang diteliti.
- c. Verifikasi Melakukan pemahaman terhadap informasi yang didapat, kemudian mencari makna catatan mengenai keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat serta proposisi(rancangan usulan), kemudian menarik pokok pikiran atau memberi solusi dan tindakan yang perlu dilanjutkan setelah memperoleh hasil penelitian.
- d. Penafsiran 36 Penafsiran merupakan pembahasan suatu sumber dengan berdasarkan sumber sumber lain yang diluar sumber itu sendiri.
- e. Kesimpulan Setelah dilakukan reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penafsiran, langkah-langkah yang dilakukan penelitian adalah mengambil kesimpulan. Kesimpulan merupakan pemaknaan terhadap data yang telah dikumpulkan, dimana kesimpulan tersebut merupakan pokok permasalahan yang diteliti

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini fokus ditujukan kepada masalah bagaimanakah :



Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP) pada Dinas Pendidikan Kota Palembang.” (Studi Kasus Pasal 3). Hasil penelitian di lapangan melalui observasi dan wawancara. Wawancara dengan Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Subbagian Perencanaan dan pelaporan, Seksi Sarana Prasarana Operator dan Masyarakat/Peserta Didik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian penulis sajikan berdasarkan pada konsep Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III terdiri dari 4 (empat) indikator (Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi) dan konsep Peraturan Menteri Dalam pendidikan Dan Kebudayaan No. 10 Tahun 2010 Pasal 3 terdiri dari 6 (enam) indikator (Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel, Kepatutan, Manfaat). Adapun hasil dari penelitian yang penulis lakukan akan diuraikan sebagai berikut:

5.1.1 Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP) pada Dinas Pendidikan Kota Palembang.” (Studi Kasus Pasal 3)

A. Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, di mana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi.

a. Komunikasi (Communication)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran komunikasi melalui rapat dan sosialisasi,

informasi yang di terima sudah cukup jelas dan konsisten.

b. Sumber Daya (Resources)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa struktur birokrasi sudah dijalankan sebagai pelaksana ketentuan yang mana mendukung para pegawai untuk lebih berperan aktif lagi dalam melaksanakan peraturan yang telah diberlakukan di

Dinas Pendidikan Kota Palembang.

B. Prinsip Pelaksanaan Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar (PIP) menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) Pasal

3 dilaksanakan dengan prinsip:

a. Efektif

Berdasarkan wawancara diatas bahwa Pelaksanaan Program Indonesia

Pintar sudah dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang namun belum dirasakan efektif karena pemembriannya dilakukan secara acak dan tidak sesuai

dengan kenyataan dilapangan ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia

Pintar (PIP).

b. Efisien

Pintar harus terdata di Aplikasi

Berdasarkan wawancara diatas bahwa Pelaksanaan Program Indonesia

Pintar sudah dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang namun belum

dirasakan efisien karena waktu yang perlukan cukup lama ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP).

c. Transparan

Berdasarkan wawancara diatas bahwa Pelaksanaan Program Indonesia

Pintar sudah dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang dengan



transparan seperti penyalurannya melalui BANK yang telah ditunjuk agar dana yang ada tidak disalah gunakan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP).

d. Akuntabel

Berdasarkan wawancara diatas bahwa Pelaksanaan Program Indonesia Pintar sudah dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang dalam Penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) dapat dipertnggungjawabkan secara hukum yaitu dengan cara membuat laporan jumlah dana yang telah disalurkan kepada siswa yang berhak menerima ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP)..

e. Keputusan

Berdasarkan wawancara diatas bahwa Pelaksanaan Program Indonesia Pintar sudah dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang dalam Penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) sangat bermanfaat sekali bagi orang tua dan siswa ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP).

5.2 Pembahasan

Adapun pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

5.2.1 Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III,

a. Komunikasi (Communication)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran komunikasi melalui rapat dan sosialisasi, informasi yang di terima sudah cukup jelas dan konsisten sesuai dengan teori George C. Edward III dimana komunikasi yang baik dilakukan melalui tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

b. Sumber Daya (Resources)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa Pelaksanaan Program Indonesia Pintar sudah dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang namun belum dirasakan efisien karena waktu yang perlukan cukup lama ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP)

c. Transparan

Berdasarkan wawancara diatas bahwa Pelaksanaan Program Indonesia Pintar sudah dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang dengan transparan seperti penyalurannya melalui BANK yang telah ditunjuk agar dana yang ada tidak disalah gunakan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP)

D. Akuntabel

Berdasarkan wawancara diatas bahwa Pelaksanaan Program Indonesia Pintar sudah dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang dalam Penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) dapat dipertnggungjawabkan secara hukum yaitu dengan cara membuat laporan jumlah dana yang telah disalurkan kepada siswa yang berhak menerima ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 10 Tahun 2020 tentang Program 86 Indonesia Pintar (PIP)

e. Keputusan

Berdasarkan wawancara diatas bahwa Pelaksanaan Program Indonesia Pintar sudah dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang dalam Penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) telah dikerjakan secara proporsional ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP)..



f. Manfaat

Berdasarkan wawancara diatas bahwa Pelaksanaan Program Indonesia Pintar sudah dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang dalam Penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) sangat bermanfaat sekali bagi orang tua dan siswa. ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP)

E. BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

A Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP) pada Dinas Pendidikan Kota Palembang dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP) pada Dinas Pendidikan Kota Palembang sudah berjalan baik. Ini terlihat dari indikator masing-masing indikator dari Implementasi yaitu (Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Disposisi, Struktur Birokrasi) dan juga dari indikator Prinsip Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) (Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel, Kepatutan, Manfaat) hanya untuk indikator efektif dan efisien pendistribusian atau penyampaian kepada masyarakat atau peserta didik masih memerlukan waktu yang lama karena harus melalui proses pemeriksaan data dan berkas serta validasi data di Aplikasi Dapodik sehingga menjadi tidak efektif dan efisien

B. Saran

Saran Berdasarkan simpulan diatas, penulis menyarankan hendaknya Dinas Pendidikan Kota Palembang dapat memberikan solusi lain untuk mengatasi permasalahan dalam pengolahan data siswa seperti pengecekan berkas

administrasi siswa serta validasi data di Aplikasi Dapodik agar dapat berjalan cepat sehingga penyaluran dana Program Indonesia Pintar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto 2009:122 *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darwin, 1994: 34 “*Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah*,” Jurnal Pendidikan, 21(2), hal. 122–132. doi: 10.33830/jp.v21i2.907.2020.
- Donald Van Metter dan Carl Van Horn 2012:155 *Model-model dalam Kebijakan Implementasi*, yongyakarta
- Friedrich : 2007 “*Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan*,” Journal of Education Management and Administration Review, 2(1), hal. 1–12.
- Hogwood dan Gunn 2012:167 *Ilmu pemerintahan. Terjemahan R.L.L. Tobing*. Jakarta: Erlangga.
- Horn Tahir, 2014:55 “*The Impact of Bolsa Família on Schooling*,” World Development, 70, hal. 303–316. doi: 10.1016/j.worlddev.2015.02.001.
- Chernichovsky, D. dan Meesook, O. A. 1985. School Enrollment in Indonesia, World Bank Staff Working Paper Number 746. 746.
- Majone dan Wildavsky 2002:30 *Implementasi sebagai penilaian.: Studi Implementasi* [Online], 2 halaman. Tersedia : <http://www.laporanpenelitian.cc.co.id/tml> [7 Maret 2009]
- Nasution 2018:161 *Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000).
- Nugroho (2004:1-7 *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Sekolah*



- Anak Jenjang SMP dan SMA di Sumatera Barat. Universitas Indonesia.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Tachjan 2006:25 *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Uma Sekaran 2016:83 *Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif*. Jurnal Tarbiyah : Jurnal Ilmiah Kependidikan, 7(1), 17–23. <https://doi.org/10.18592/tarbiyah.v7i1.2100>
- Usman 2002:70 *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah serta Angka Putus Sekolah Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama: Data Panel 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2006*
- Widodo 2007:12 “Kinerja Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar (Survei pada 6 Provinsi di Indonesia),” *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 19(1), hal. 1689-1699.

